

INOVASI SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN

KABUPATEN GOWA

Innovation Suistainable Class Completed System Gowa Regency

**NUR WAHID
P0800213001**



PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

**LEMBARAN PENGESAHAN
HASIL PENELITIAN**

**INOVASI SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN (SKTB)
KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh :

**NUR WAHID
P0800213001**

Telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan
Panitia Ujian Hasil Penelitian
Pada tanggal... Oktober 2015

Menyetujui

Komisi penasehat

Ketua

Anggota

Prof. Dr. H. Nur Sadik, MPM

Dr. Hj. Hasniati, M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Administrasi Pembangunan

Dr. H. Muhammad Yunus, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Inovasi	12
B. Tipe/ Jenis-jenis Inovasi Sektor Publik.....	21
C. <i>Best Practices</i> dan Indikator Penilaian Inovasi.....	28
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi.....	35
E. Penelitian Terdahulu.....	45
F. Kerangka Konseptual Penelitian.....	48
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Fokus Penelitian.....	54
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	55
E. Populasi dan Sampel Penelitian.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis data.....	59
G. Pengecekan Validitas Temuan.....	61
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Lokasi Penelitian.....	62
B. Hasil Penelitian.....	83
1. Jenis-jenis Inovasi SKTB Kabupaten Gowa.....	83
2. Level Inovasi SKTB Kabupaten Gowa.....	107
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi.....	130
C. Pembahasan.....	152
1. Jenis-jenis Inovasi SKTB Kabupaten Gowa.....	152
2. Pembahasan Level Inovasi SKTB Kabupaten Gowa.....	157
3. Pembahasan Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi...	159

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	168
B. Saran.....	168

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.	Sumber-sumber Inovasi Pemerintahan.....	16
2.	Kerangka Konseptual Penelitian.....	48
3.	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	60
4.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa.....	65
5.	Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan dalam Gambar.....	86
6.	Level Inovasi berdasarkan semua Dimensi.....	129

DAFTAR TABEL

Gambar	Judul	Halaman
1.	Tipe Inovasi Dalam Sektor Publik.....	22
2.	Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	46
3.	Jumlah Personalia Menurut Jenis Kelamin Pada Dinas Pendidikan.....	64
4.	Pengelompokan Bentuk Inovasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Kabupaten Gowa.....	84
5.	Penilaian sebelum penerapan SKTB.....	88
6.	Keseluruhan Hasil belajar Kognitif.....	90
7.	Keseluruhan Proses Internalisasi Nilai Menjadi Sikap dan Kebiasaan.....	92
8.	Proses Internalisasi Nilai-nilai Rana Afektif.....	93
9.	Jenjang pencapaian keterampilan Psikomotorik.....	94
10.	Konversi Hasil Belajar Kedaftar Nilai.....	95
11.	Universitas Mitra Kabupaten Gowa.....	100
12.	Perguruan Tinggi Yang Menjalankan Program Kerjasama Disertai Jumlah Mahasiswa dan Beasiswa.....	101
13.	Daftar nama Mahasiswa dan Jurusan Diperguruan Tinggi.	102
14.	Level Inovasi Berdasarkan Keseluruhan Dimensi.....	126
15.	Jumlah Skor, Skor Ideal, Presentasi berdasarkan Keseluruhan Dimensi Menurut Responden.....	127
16.	Ketersediaan SDM Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.....	134
17.	Dana Pendidikan Diknas Kabupaten Gowa.....	135
18.	Tim Ahli Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.....	146
19.	Mitra Perguruan Tinggi SKTB.....	148
20.	Tabel SWOT.....	151

DAFTAR GRAFIK

Gambar	Judul	Halaman
1.	Level Inovasi Berdasarkan Dimensi Dampak Positif.....	108
2.	Level Inovasi Berdasarkan Dimensi Kemitraan	110
3.	Level Inovasi Berdasarkan Dimensi Keberlanjutan.....	113
4.	Level Inovasi Berdasarkan Dimensi Kepemimpinan.....	116
5.	Level Inovasi Berdasarkan Dimensi Pemberdayaan Masyarakat.....	118
6.	Level Inovasi Berdasarkan Dimensi Transfer Program.....	120
7.	Level Inovasi Berdasarkan Dimensi Konteks Lokal.....	122
8.	Level Inovasi Berdasarkan Dimensi Kesetaraan Masyarakat.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Inovasi adalah keniscayaan untuk memenuhi tuntutan publik yang semakin tinggi; Inovasi adalah jawaban paling cerdas untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Inovasi harus menjadi gerakan nasional untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan pemerintahan kelas dunia.

Inovasi telah menjadi perhatian penting dalam setiap periodisasi pemerintahan "*Inovasi Atau Mati*" sebagai solusi untuk memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan daya saing dalam dunia Global, Kata inovasi seringkali dikaitkan dengan perubahan, tetapi tidak semua perubahan dapat dikategorikan sebagai inovasi.

Dalam konsep historis ternyata inovasi telah lama terjadi dalam kurun seratus tahun terakhir. Inovasi ini telah mampu menciptakan dunia yang sama sekali berbeda dari dunia seratus tahun sebelumnya. Inovasi Amerika Serikat menciptakan sebuah paradigma baru tentang sistem pemerintahan yang bernama demokrasi. Perancis menciptakan sebuah nilai baru bernama kebebasan, persamaan, persaudaraan. Inggris menciptakan Inovasi Industri sebuah cara baru berproduksi. Ketiga inovasi tersebut memberi jalan bagi inovator lanjutan yang mengubah cara hidup manusia (*how the way people live*).

Inovasi (*innovation* dan *Innovate*) mulai dikenal dalam kosakata bahasa Inggris pada abad ke- 16 hanya saja pada masa itu, inovasi lebih banyak diasosiasikan secara negatif sebagai *troublemaker* serta lebih identik dengan nuansa

revolusi atau perubahan radikal yang membawa dampak yang negatif, terutama dalam dinamika sosial politik serta di anggap mengancam struktur kekuasaan. Sehingga rezim kenegaraan dan sistem politik serta otoritas keagamaan di masa itu cenderung menolak tentang konsep inovasi.

Innovative mulai dikembangkan dan dipergunakan oleh masyarakat pada abad ke-17, atau 100 tahun yang lalu, namun setelah 300 tahun kemudian pengertian inovasi mulai bersimbiosis menjadi lebih positif. Inovasi dipahami sebagai "*Creating of Something New*" atau penciptaan sesuatu yang baru. Istilah inovasi untuk pertama kali dipopulerkan oleh *Oxford English Dictionary* edisi tahun 1939 yaitu "*The Act of Introducing New Product Into Market*". Dalam hal ini inovasi dipahami sebagai proses penciptaan produk (barang atau jasa) baru.

Dalam konsep teori, beberapa literatur mencoba untuk memaknai tentang konsep inovasi dalam terminologi umum, inovasi dalam pandangan Robbins (1994:436). adalah penggunaan gagasan-gagasan baru bagi organisasi yang menerimanya. Rogers (1983: 11) memberikan batasan yang dimaksud dengan inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau objek benda yang dipandang baru oleh seseorang atau kelompok adopter lain. Kata "baru" bersifat sangat relatif, bisa karena seseorang baru mengetahui, atau bisa juga karena baru mau menerima meskipun sudah lama tahu.

Beberapa asumsi yang mengungkap makna pentingnya inovasi dalam pemerintahan telah menjadi kajian terutama dalam hubungannya dengan capaian pemerintahan daerah yang melaksanakan desentralisasi . Makna pentingnya inovasi terhadap peningkatan kapasitas pemerintahan juga diungkapkan oleh Ali Farazmand

(2004:20) bahwa “*Without innovative and adaptive administrative or managerial system, Innovative policies are doomed to failure*”.

Dalam kajian administrasi publik, pada dasarnya telah menjadi kajian sejak berdirinya administrasi sebagai ilmu. Secara teoritis konsep inovasi dapat di telusuri dalam perkembangan pergeseran paradigma administrasi publik. Dalam pandangan Henry (1988:59-106) pada paradigma ke-5 yaitu “paradigma Administrasi Publik sebagai administrasi publik” konsep inovasi menjadi kajian dalam teori organisasi. Henry berpendapat bahwa, kemampuan untuk mengadakan perubahan, maka inovasi akan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan daerah atau bangsa. Dari kajian tersebut, kemudian muncul berbagai kajian akademik untuk mereformasi sektor publik dengan mempergunakan pendekatan *New Publik Manajement*.

Frederickson et.al.,(2003) dalam bukunya “*The Public Administration Theori Primer*” memberikan gambaran secara rinci beberapa teori dan pendekatan analitis yang berkontribusi terhadap konsep administrasi. Pada bagian lain Frederickson et. al., (2010: 89-95) menegaskan bahwa studi tentang difusi inovasi dalam inovasi kelembagaan merupakan inti (*core body*) riset dalam teori kelembagaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa munculnya kajian tentang inovasi juga dipengaruhi oleh teori-teori administrasi publik.

Inovasi dalam kajian pendidikan merupakan hal yang sangat vital dalam pembentukan pribadi manusia, Tereliminasi pendidikan nilai pada kurikulum lembaga pendidikan formal disinyalir oleh berbagai kalangan sebagai salah satu penyebab utama akan kemerosotan moral dan budi pekerti masyarakat yang tercermin dari tingginya angka kriminalitas maupun perbuatan amoral. Dalih integrasi pendidikan nilai dalam pendidikan kewarganegaraan dan keagamaan, pada

implementasinya menjadi tidak tepat sasaran karena pendidikan nilai diberikan dengan metode hapalan dengan porsi yang minim untuk memenuhi evaluasi proses pendidikan yang hanya mengukur ranah kognitif semata. Tentunya hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip pendidikan nilai yang mencakup ranah afektif dan tidak dapat terukur dengan model evaluasi pendidikan sebagaimana ditentukan oleh sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, inovasi selalu dibutuhkan, terutama dalam bidang pendidikan, untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak hanya terbatas masalah pendidikan tetapi juga masalah-masalah yang mempengaruhi kelancaran proses pendidikan, salah satu aspek penting dalam konteks pendidikan dimanapun adalah dengan memperhatikan kurikulum, metode, model dan media yang diusung oleh pendidikan tersebut.

Seringkali kurikulum, metode, model dan media dijadikan objek penderita, dalam pengertian bahwa ketidak berhasilan suatu pendidikan diakibatkan terlalu seringnya kurikulum, metode, model dan media tersebut berubah. Padahal, seharusnya dipahami bahwa kurikulum, metode, model dan media seyogyanya dinamis, harus berubah mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya. Cuban (1991) mengemukakan bahwa untuk memahami perubahan kurikulum perlu untuk dipahami tiga pokok pemikiran tentang perubahan tersebut yakni: (a) rencana perubahan itu selalu baik, (b) harus dipisahkan antara perubahan (*change*) dengan kemantapan (*stability*), dan (c) apabila rencana perubahan sudah diadopsi maka perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap rencana tersebut (*improvement*).

Pesatnya perkembangan lingkungan lokal, regional, dan internasional saat ini berimplikasi terhadap penanganan penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang ada. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, kebutuhan untuk memenuhi tuntutan meningkatkan mutu pendidikan sangat mendesak terutama

dengan ketatnya kompetitif antar bangsa di dunia saat ini. Sehubungan dengan hal ini, paling sedikit ada tiga fokus utama yang perlu diatasi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu: (1) upaya peningkatan mutu pendidikan; (2) relevansi yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) tata kelola pendidikan yang kuat. Namun disadari bahwa ketiganya tetap mendesak dan relevan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional pada waktu yang akan datang.

Pada konteks Indonesia, Inovasi dalam pemerintah daerah mulai mendapat perhatian sejak terjadinya pergantian rezim orde baru ke-rezim orde reformasi yang ditandai dengan pelimpahan wewenang dari sentralisasi ke desentralisasi yang diperkuat dengan legitimasi melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian dimodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pada pasal 2 ayat (3), yang menjadi landasan normatif bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 18 yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerjanya yang di dalamnya mengandung unsur inovasi atau/ terobosan yang inovatif. Munculnya inovasi program telah membawa dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (<http://inspirasi.bangsa.com>).

Diantara 23 Daerah Kabupaten /Kota dan Provinsi yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah, **untuk Kategori Kabupaten di berikan 10 Kategori yaitu: (1)** Kabupaten Banjar menyelesaikan masalah lingkungan, (2) Kabupaten Lamongan daerah terbaik pendidikan, (3) Kabupaten Katingan penghargaan di sektor kesehatan, (4) Kabupaten Raja Ampat sektor pariwisata, (5) Kabupaten Gorontalo terbaik sektor perempuan dan anak, (6) Kepulauan Meranti terbaik di

sektor infrastuktur, (7) Kabupaten Banyuwangi terbaik di sektor ekonomi kreatif, (8) Kabupaten Bantaeng terbaik sektor investasi bisnis, (9) Kabupaten Rokan Hulu terbaik sektor layanan publik, (10) Kabupaten Banyuasin terbaik sektor pendidikan.

Untuk Kategori Kota diberikan penghargaan kepada 10 Kota, yaitu: (1) Kota Tangerang terbaik sektor peduli lingkungan, (2) Kota Cilegon terbaik sektor pendidikan, (3) Kota Lubuklinggau terbaik kesehatan siap siaga jemput bola, (4) Kota Sawah Lunto terbaik sektor pariwisata, (5) Kota Surabaya terbaik sektor perempuan dan anak, (6) Kota Bandung terbaik sektor infrastruktur, (7) Kota Pekalongan terbaik sektor ekonomi kreatif, (8) Kota Pekanbaru terbaik sektor investasi, (9) Kota Semarang terbaik sektor layanan publik, (10) Kota Lubuk Linggau kota terbaik Kesehatan dan *Good Governance*.

Untuk Kategori Provinsi diberikan 3 Penghargaan yaitu: (1) Provinsi Kalimantan Tengah terbaik sektor peduli lingkungan, (2) Provinsi Jawa Barat terbaik sektor pendidikan, (3) Provinsi Darmas Raya untuk pemekaran terbaik.

Tingginya penghargaan yang diberikan pemerintah pusat dengan meluncurkan *Innovative Government Award* (IGA). Maka setiap daerah akan memacu diri untuk melakukan inovasi demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Penilaian Inovasi diarahkan pada empat kategori inovasi yakni: pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Dengan kesuksesan pembangunan di setiap daerah maka memberikan spirit bahwa inovasi diperlukan oleh birokrasi dalam konteks reformasi layanan publik. Kemampuan pemerintah dalam berinovasi berkorelasi terhadap hubungan masyarakat yang baik serta dukungan dan kepercayaan yang memberikan dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat (Asrofi, 2008: 3). Oleh karena itu,

inovasi di setiap daerah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam kanca persaingan demi kesejahteraan masyarakat.

Indikator kemajuan dan keberhasilan daerah dalam mendorong keunggulan suatu daerah adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan inovasi atau perubahan namun tidak sedikit inovator mengalami resistensi atau hambatan serta resiko kegagalan dalam upaya mengembangkan inovasi disektor publik, menurut Fadel (2008) inovasi sektor publik sering mendapat tantangan karena akan mempengaruhi pola hubungan dan struktur kekuasaan yang ada dalam organisasi pemerintahan.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, kajian empirik yang menunjukkan keberhasilan inovasi pemerintah daerah dipengaruhi faktor pendukung atau faktor penghambat sebagaimana yang di anulir oleh Bigham dalam penelitiannya di pemerintahan lokal Amerika Serikat yang mencatat ada tiga faktor yang dominan dalam pengembangan inovasi, yaitu: *Comunity environment*, *organizational environment*, *organizatinal characteristcs* (Bigham dalam marti, 2000:13). Sejalan dengan hal tersebut, Irwan dkk, dalam kajiannya menunjuk dua faktor penghambat inovasi pemerintah daerah: (1) Kepemimpinan, yang meliputi visi kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan, (2) iklim organisasi meliputi reward, struktur organisasi dan lingkungan politik.

Dalam dunia internasional dalam draf resolusi PBB nomor A/60/L.24, Majelis umum PBB menyepakati bahwa PBB harus mempromosikan inovasi dalam pemerintahan dalam rangka merevitalisasi administrasi publik dengan membangun budaya inovasi, kerja sama dan responsivitas (UN, 2005: 3).

Keterangan yang dihimpun di masyarakat Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat antusias untuk meningkatkan mutu atau kualitas

pendidikan sesuai amanat Rakyat Kabupaten Gowa. Dari hasil kerja keras pemerintah Kabupaten Gowa telah di buktikan dengan beberapa penghargaan yang telah diraihnyanya di antaranya: (1) Penghargaan Ki Hajar Dewantara dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (2014); (2) UNESCO Literacy Price / Penghargaan Tertinggi Bidang Pendidikan dari UNESCO (2009); (4) Satya Lencana Wirakarya (Penghargaan Tertinggi Bidang Pendidikan) dari Presiden Republik Indonesia (2008) ; (5) Aksara Anugrah Pratama Tahun 2005; (6) Aksara Anugrah Madya Tahun 2006; dan (7) Aksara Anugrah Utama Tahun 2007. Selain beberapa penghargaan tersebut, pada tahun 2010 *Fajar Institute Pro Otonomi* (FIPO) Sulsel memberi *Otonomi Award* kepada pemerintah Kabupaten Gowa karena dinilai sukses dalam program inovasi di bidang pendidikan.

Memperhatikan kenyataan mengenai inovasi program yang telah dijalankan di Kabupaten Gowa tersebut di atas, menunjukkan bahwa daerah ini telah menjalankan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus urusan pendidikan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa dibalik keberhasilan dan berbagai penghargaan yang diterimanya, persoalan pelayanan pendidikan sudah tidak ada lagi.

Mengingat betapa pentingnya Inovasi demi kemajuan daerah, Pemerintah kabupaten Gowa kemudian meluncurkan beberapa kebijakan yang bersifat inovatif diantaranya program Pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).

Inovasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan tersebut lahir dari gagasan baru yang dilandasi oleh pemikiran bahwa untuk bersanding di dunia internasional atau Globalisasi maka pemerintah daerah harus memperbaiki beberapa sistem yang ada dalam lembaga tersebut salah satunya adalah sistem pendidikan, yang akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan lahirnya manusia-

manusia yang berkualitas itu merupakan aset sekaligus ujung tombak melawan berbagai tantangan, hambatan serta rintangan masa depan bangsa, atau negara. Logika berpikir yang demikian menunjukkan adanya inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengantarkan rakyat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dari hasil temuan di lapangan diidentifikasi bahwa lahirnya sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di kabupaten gowa dilatar belakangi oleh : (1) Carut marutnya sistem pendidikan nasional yang ditandai dengan pergantian kurikulum disetiap perodesasi kepemimpinan. (2) Rendahnya motivasi belajar siswa karna kurikulum nasional tidak mengakomodir kearifan lokal dan budaya lokal kita.

Namun dalam tataran praktis SKTB menuai beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa yakni (1) Dampak penerapan inovasi tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam mencerdaskan siswa – siswi di Kabupaten Gowa (2) Terkait dengan keberlanjutan, apakah program tersebut dapat dipertahankan dimasa yang akan datang (3) Terkait dengan kriteria apakah program tersebut telah memenuhi syarat sebagai Inovasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut,maka dipandang penting untuk diteliti dengan judul ***Inovasi sistem kelas tuntas berkelanjutan di kabupaten gowa.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka pertanyaan pokok rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana level inovasi dari kebijakan pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana jenis inovasi dari kebijakan pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana tipe inovasi dari kebijakan pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis level inovasi dari kebijakan pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa?.
2. Menganalisis jenis inovasi dari kebijakan pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa.
3. Menganalisis tipe inovasi dari kebijakan pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran mengenai konsep Inovasi Pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan baik secara teoretis akademis ataupun secara praktis, yaitu:

1. Memberikan kontribusi akademik berupa konsep pemikiran mengenai Inovasi Pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.
2. Masukan berkenaan perbaikan-perbaikan sistem pendidikan baik secara lokal maupun secara nasional Indonesia;
3. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi semua elemen yang terkait dan pihak yang berkepentingan dalam upaya perbaikan sistem pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Inovasi

Konsep Inovasi sebenarnya juga merupakan istilah yang relatif baru apabila diukur dari perjalanan sejarah peradaban manusia. Istilah ini berasal dari bahasa latin *innovare* yang berarti berubah sesuatu yang menjadi baru. Istilah inovasi (*innovation* dan *innovate*) sendiri baru mulai dikenal dalam kosakata bahasa Inggris pada abad ke-16. Hanya saja pada masa itu, istilah inovasi lebih banyak diasosiasikan secara negatif sebagai *troublemaker* serta lebih identik dengan nuansa revolusi atau perubahan radikal yang membawa dampak yang sangat luar biasa, terutama terhadap keamanan sosial politik serta dianggap mengancam struktur kekuasaan. Sehingga rezim kekuasaan dan politik, serta otoritas keagamaan pada masa itu cenderung menolak segala hal yang berbau inovasi. Adapun istilah *innovative* sendiri mulai luas dipergunakan banyak orang sejak abad ke-17, atau sekitar 100 tahun kemudian.

Barulah kemudian setelah sekitar 300 tahun kemudian, pengertian inovasi perlahan mengalami pergeseran makna menjadi lebih positif. Inovasi dipahami sebagai “creating of something new” atau penciptaan sesuatu yang baru. Istilah inovasi menemukan pengertian modernnya untuk pertama kali (Oxford English Dictionary edisi tahun 1939 dalam Suwarno, 2008:54) yaitu “*the act of introducing anew product into market*”. Dalam hal ini inovasi dipahami sebagai proses penciptaan produk (barang atau jasa) baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang *incremental*.

Dalam terminologi Umum, Inovasi adalah suatu ide kreatif dimana diimplementasikan untuk menyelesaikan tekanan dari suatu masalah (UN dalam

Sangkala, 2014:26), atau tindakan penerimaan dan pengimplementasian cara baru untuk mencapai suatu hasil dan atau pelaksanaan suatu pekerjaan.

Dalam literatur modern, ada berbagai pengertian yang beragam dan perspektif yang mencoba memaknainya. Inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang baik yang sifatnya baru lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya. Pengertian ini menekankan pemahaman inovasi sebagai sebuah kegiatan (proses) penemuan (*invention*).

Inovasi adalah ide baru, cara mengerjakan sesuatu yang telah diperkenalkan atau diteliti. (Oxford Advanced Learner's Dictionary edisi tahun 1939 dalam Suwarno, 2008:56). Damanpour (dalam Suwarno 2008:9) dijelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.

Sementara itu, Menurut Rogers (dalam Suwarno 2008:9) , salah satu penulis buku inovasi terkemuka, menjelaskan bahwa an innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by individual or other unit of adopter. Jadi inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya.

Pengertian dari Damanpour maupun Rogers ini menunjukkan bahwa inovasi dapat merupakan sesuatu yang berwujud (*tangible*) maupun sesuatu yang tidak berwujud (*intangible*). Sehingga dimensi dari inovasi sangatlah luas. Memaknai inovasi sebagai sesuai yang hanya identik dengan teknologi saja akan jadi menyempitkan konteks inovasi yang sebenarnya.

Adapun pemikir lain yang mencoba memberikan limitasi dalam memahami inovasi adalah Schumpeter (Halvorsen, 2005: 8) yang membatasi pengertian inovasi yaitu : “restricted themselves to novel products and processes finding a commercial application in the private sector”. Dalam pembatasan ini Rogers (1983:31) menekankan 2 (dua) hal penting dari inovasi, yaitu:

1. Sifat kebaruan (novelty) dari sebuah produk. Dengan kata lain inovasi hanya berhubungan dengan produk-produk yang bersifat baru.
2. Bahwa inovasi berhubungan dengan proses pencarian aplikasi komersial di sektor bisnis.

Penulis lain yaitu Steelman (2001:10) secara sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya. Selanjutnya Mulgan & Albury (dalam Sangkala, 2014:6) secara rinci menjelaskan bahwa :

“successful innovation is the creation and implementation of new processes, products, services, and methods of delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness, or quality”.

Ini menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas.

Koch (dalam Sangkala, 2014:26) mengatakan bahwa Inovasi adalah persoalan penggunaan hasil pembelajaran yaitu penggunaan kompetensi anda sebagai dasar penemuan cara baru dalam melakukan sesuatu yang memperbaiki kualitas dan efisiensi layanan yang disediakan.

Inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi (Damanpour, 1991:34).

Inovasi adalah realisasi ide yang unik/kreatif. Realisasi ini biasanya memerlukan solusi kreatif bagi masalah yang muncul dari sejak ide dimunculkan sampai menjadi sebuah produk.

B. Inovasi Sistem Pendidikan

1. Pengertian Inovasi Sistem Pendidikan

Inovasi pendidikan atau pembaharuan pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif, berbeda dari hal (yang ada sebelumnya) serta diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Definisi diatas dikemukakan oleh Hamijoyo (dalam Wijaya dkk. 1991:6).

Selanjutnya beliau menjabarkan istilah dalam definisi tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. "Baru" dapat diartikan apa saja yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh sipenerima pembaharuan, meskipun mungkin bukan baru lagi bagi orang lain. Akan tetapi, yang lebih penting dari sifatnya yang baru adalah sifat kualitatif berbeda dari sebelumnya.
- b. "Kualitaitaif" berarti bahwa pembaharuan itu memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsur -unsur dalam pendidikan. Jadi bukan semata-mata penjumlahan atau penambahan unsur –unsur setiap komponen.
- c. "Hal" yang demikian dalam definisi tadi banyak sekali, meliputi semua komponen dan aspek dalam subsistem pendidikan. Yang diperbaharui pada hakikatnya adalah ide atau rangkaian ide.

- d. "Kesengajaan" merupakan unsur perkembangan baru dalam pemikiran para pendidik dewasa ini.
- e. "Meningkatkan kemampuan" mengandung arti bahwa tujuan utama pembaharuan pendidikan adalah kemampuan sumber-sumber tenaga, uang dan sarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi.
- f. "Tujuan" yang direncanakan harus dirinci dengan jelas tentang sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai, yang sedapat mungkin dapat diukur untuk mengetahui perbedaan antara keadaan sesudah dan sebelum pembaharuan dilaksanakan. Sedangkan tujuan pembaharuan itu sendiri adalah efisiensi, relevansi, dan keefektifan mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya (menurut kriteria pendidikan masyarakat, anak didik, dan pembangunan) dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah sekecil-kecilnya.
- g. "Hal yang ada sebelumnya" luas sekali, mulai dari ide, tujuan, organisasi, proses dan lain-lain. Namun, untuk Indonesia perhatian lebih dicurahkan pada pembaharuan yang berkisar diantara masalah:
 - 1) lebih meratanya pelayanan pendidikan
 - 2) lebih serasinya kegiatan pendidikan belajar dengan tujuan,
 - 3) lebih efisiensi dan ekonomisnya pendidikan

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud pembaharuan dibidang pendidikan atau inovasi pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik.

2. Tujuan Inovasi Sistem Pendidikan

Pembaharuan pendidikan sebagai perspektif baru dalam dunia kependidikan mulai dirintis sebagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan

yang belum dapat diatasi dengan cara yang konvensional secara tuntas. Jadi pembaharuan dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia kependidikan yang memberikan harapan kemajuan lebih pesat.

Secara garis besarnya, tujuan dari inovasi pendidikan itu sendiri (Tim Dosen IKIP Malang, 2003:202-208) adalah:

- a. Pembaharuan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah -masalah pendidikan. Titik pangkal pembaharuan pendidikan adalah masalah pendidikan yang aktual yang secara sistematis akan dipecahkan dengan cara yang inovatif. Cara inovatif yang dimaksudkan adalah segala cara pemecahan yang terpilih dan secara nyata mampu memecahkan masalah yang timbul (yang nyata-nyata dihadapi).

Beberapa tahap yang penting dalam penerapan pembaharuan pendidikan meliputi:

- 1) Penentuan masalah
- 2) Penentuan tujuan/ sasaran
- 3) Mempertimbangkan segala sumber dan hambatan yang berkaitan
- 4) Pengumpulan alternatif pemecahan
- 5) Penentuan alternatif terpilih
- 6) Pencobaan
- 7) Modifikasi dan revisi alternatif pemecahan,
- 8) Pelaksanaan dan pengembangannya

Pendekatan sistem dalam usaha pembaharuan pendidikan dipandang sebagai tanggapan terhadap masalah pendidikan yang baru dan komprehensif. Pembaharuan pendidikan dengan pendekatan sistem untuk pemecahan masalah

pendidikan yang mengutamakan subjek pendidikan lebih bersifat tanggap (responsive) terhadap masalah-masalah yang baru.

- b. Pembaharuan pendidikan sebagai upaya untuk memperkembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Sifat pendekatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah pendidikan yang kompleks dan berkembang itu harus berorientasi pada masalah efektif dan murah, serta peka terhadap timbulnya masalah pendidikan yang baru.

3. Hambatan dan Sebab-Sebab Inovasi Sistem Pendidikan

Menurut Skogen (1997:176), ada empat macam kategori hambatan dalam konteks inovasi. Keempat kategori tersebut adalah:

a. Hambatan psikologis

Hambatan-hambatan ini ditemukan bila kondisi psikologis individu menjadi faktor penolakan. Hambatan psikologis telah dan masih merupakan kerangka kunci untuk memahami apa yang terjadi bila orang dan system melakukan penolakan terhadap upaya perubahan. Beberapa dimensi tantang aspek hambatan psikologi pribadi seseorang antara lain:

- 1) dimensi kepercayaan/keamanan versus ketidakpercayaan/ketidak amanan
- 2) rasa bersalah,
- 3) kebutuhan akan pengakuan,
- 4) keinginan untuk menguasai,
- 5) pola peranan yang kaku dalam sistem sosial,
- 6) pola perilaku yang kurang pertimbangan atau tidak pantas yang dipertahankan berdasarkan prinsip -prinsip imbalan tertentu, atau ketidaktahuan tentang masalah.

b. Hambatan praktis

Hambatan praktis adalah faktor -faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Untuk memberikan contoh tentang hambatan praktis, faktor –faktor berikut ini akan dibahas:

1) Waktu

Dalam hal mengimplementasikan perubahan, faktor waktu sering kurang diperhitungkan. Segala sesuatu memerlukan waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengalokasikan banyak waktu bila kita membuat perencanaan inovasi. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah yang tidak diharapkan, yang mungkin tidak dapat diperkirakan pada tahap perencanaan, kemungkinan akan terjadi.

2) Sumber daya

Dalam perencanaan dan implementasi inovasi, tingkat pengetahuan dan jumlah dana yang tersedia harus dipertimbangkan. Ini berlaku terutama jika sesuatu yang sangat berbeda dari praktek di masa lalu akan dilaksanakan, dengan kata lain jika ada perbedaan yang besar antara yang lama dengan yang baru. Dalam kasus seperti ini, tambahan sumber daya dalam bentuk keahlian dan keuangan dibutuhkan.

3) Sistem

Organisasi atau sistem itu sendiri dapat menjadi hambatan bagi inovasi. Dalam kasus tertentu, struktur organisasi dapat menjadi hambatan bila menghadapi dan memecahkan masalah baru.

c. Hambatan nilai-nilai

Hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai -nilai, norma-norma dan tradisi-tradisi yang dianut orang-orang tertentu, tetapi mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut

sejumlah orang lain. Jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai sebagian peserta, maka bentrokan nilai akan terjadi dan penolakan terhadap inovasi pun muncul.

d. Hambatan kekuasaan.

Seseorang yang berada pada posisi kekuasaan atau mereka yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dapat menjadi hambatan dalam suatu inovasi jika alokasi kekuasaan pribadi, profesional atau ekonomi terancam atau berkurang oleh perubahan praktek-praktek yang telah ada (Skogan, 1997:178)

Hambatan-hambatan lain inovasi pendidikan yang datang baik dari luar maupun dari dalam sistem pendidikan itu sendiri, diantaranya adalah:

- 1) Sumber-sumber yang makin terbatas dan belum dimanfaatkannya sumber yang ada secara efektif dan efisien.
- 2) Sistem pendidikan yang masih lemah dengan tujuan yang masih kabur, kurikulumnya belum serasi, relevan, suasana belum menarik, dan sebagainya
- 3) Pengelolaan pendidikan yang belum mekar dan mantap dan belum peka terhadap perubahan dan tuntutan keadaan, baik masa kini maupun masa akan datang
- 4) Masih kabur dan belum mantapnya konsepsi tentang pendidikan dan interpretasinya dalam praktek
- 5) Etimasi yang tidak tepat terhadap inovasi
- 6) Konflik dan motivasi yang kurang sehat
- 7) Lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan
- 8) Masalah-masalah keuangan (financial) yang tidak memenuhi
- 9) Adanya penolakan dari kelompok tertentu atas hasil inovasi
- 10) Kurang adanya hubungan sosial dan publikasi (Subandijah, 1993:81)

Sedangkan sebab-sebab diadakannya inovasi pendidikan diantaranya adalah:

- 1) Bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapat pendidikan, yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai
- 2) Berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan pengetahuan yang terus menerus dan demikian menuntut pendidikan yang lebih lama sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup (*long life education*)
- 3) Berkembangnya teknologi yang mempermudah manusia dalam menguasai dan memanfaatkan alam lingkungannya, tetapi yang sering kali ditangani sebagai suatu ancaman terhadap kelestarian peranan manusiawi (Wijaya. 2003:8).

Menurut Tilaar (1999:351), yang menjadi hambatan-hambatan inovasi pendidikan dan sebabnya adalah :

- 1) Birokrasi Pemerintah

Satu hal ini, yang menjadi hambatan paling mendasar. karena inovasi pendidikan adalah skala nasional yang merupakan suatu keputusan politik tingkat tinggi pada sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan masyarakat. hal itu disebabkan karena adanya perubahan struktur dalam pemerintahan, sehingga inovasi yang telah digagas sebelumnya tidak terlaksana dengan sepenuhnya. karena disebabkan oleh munculnya gagasan-gagasan baru dari pemerintah yang merasa kurang puas dengan hasil gagasan sebelumnya. ini juga merupakan kepentingan orang-orang yang didalam pemerintahan, untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri

dengan jalan mengorbankan gagasan yang belum sepenuhnya diterapkan dalam pendidikan. seperti, kurikulum pendidikan, yang terus mengalami perubahan.

2) Biaya Pendidikan

Hal yang satu juga menjadi permasalahan yang sangat vital dalam dunia pendidikan, khususnya dalam inovasi pendidikan yang pada dasarnya mencari gagasan yang kompeten untuk peningkatan mutu dalam pendidikan. karena untuk membuat inovasi yang sesuai dengan harapan, perlu dana yang memadai. hal ini disebabkan oleh perekonomian indonesia yang masih jauh dibawah batas normal standart perekonomian dunia. sehingga dari pemerintah kita sendiri masih kesulitan untuk memberikan biaya pendidikan yang sesuai dengan kebijakannya dalam PP. Contohnya seperti; biaya pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sebesar 20% dari anggaran pendapatan negara.

3) Guru

Dalam pendidikan peran seorang guru sangat diperlukan, apalagi profesionalitas guru itu harus dipertimbangkan dahulu sebelum beliau memberikan pemikirannya dalam pendidikan, khususnya dalam pengajaran. hal ini disebabkan oleh SDM guru yang masih rendah. Dan masih perlu pembinaan yang khusus, sehingga inovasi dalam dunia pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan (Soemanto, 1980:63)

4) Siswa

Dalam hal ini, yang jadi sorotan adalah kesiapan siswa dalam menerima inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan. karena apabila siswa belum merasa siap menerima inovasi baru, maka akan dirasa sia-sia. hal ini

disebabkan karena siswa harus menyesuaikan diri lagi dengan gagasan baru (dalam inovasi). dan hal yang dikhawatirkan dapat muncul, ketika memang inovasi itu tidak dapat diaplikasikan dengan maksimal. seperti, out-put yang jelek disebabkan oleh tidak siapnya siswa menerima gagasan baru tersebut

5) Masyarakat

Masyarakat juga memerlukan kesiapan untuk menerima inovasi -inovasi baru. karena peran masyarakat juga tidak dapat dinafikan dalam dunia pendidikan. masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan dilingkungannya masing-masing. hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat tentang pendidikan yang sangat parsial, sehingga kesiapannya pun perlu ditata untuk menerima inovasi -inovasi baru itu (Tilaar, 1999:351).

6) Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan ini menyangkut beberapa hal, sarana - prasarana pendidikan, sistem pendidikan dalam sekolah -sekolah, bisa juga biaya pendidikan. hal ini disebabkan karena penyediaan beberapa hal tersebut yang sampai sekarang masih sangat minim. sehingga untuk mengeluarkan inovasi - inovasi terbaru masih sangat sulit, karena terhambat oleh hal tersebut. Maka dapat disimpulkan, bahwa inovasi pendidikan setara makro pada tingkat nasional adalah syarat kompleks karena berkaitan dengan masalah biaya, fasilitas, validitas dari pada inovasi itu sendiri, skala percobaan, konformitas dengan kebijakan nasional, nilai -nilai birokrasi dan budaya serta tentunya kepentingan politik dan ekonomi. dengan demikian dapat diambil pelajaran bahwa, inovasi secara makro masih menghadapi banyak kendala dan akan berakhir dengan kegagalan rupa-rupanya perlu dipersiapkan dengan matang (Tilaar, 1999:351).

4. Komponen yang Harus Diperhatikan dalam Inovasi Pendidikan

Untuk menghindari penolakan seperti yang disebutkan di atas, faktor - faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum dan fasilitas, dan program/tujuan (Noor, 2008)

a. Guru

Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai.

Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru antara lain adalah:

- 1) penguasaan materi yang diajarkan
- 2) metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa
- 3) hubungan antar individu, baik dengan siswa maupun antar sesama guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan seperti administrator, misalnya kepala sekolah dan tata usaha serta masyarakat sekitarnya
- 4) pengalaman dan ketrampilan guru itu sendiri.

Dengan demikian, maka dalam pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Tanpa melibatkan mereka, maka sangat mungkin mereka akan menolak inovasi yang diperkenalkan kepada mereka.

b. Siswa

Sebagai obyek utama dalam pendidikan terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelegensi, daya motorik, pengalaman, kemauan dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan dari perubahan itu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekwen. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga mengurangi resistensi seperti yang diuraikan sebelumnya.

c. Kurikulum

Kurikulum pendidikan, lebih terbatas lagi kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah.

d. Fasilitas

Fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan. Misalnya ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja dan sebagainya.

e. Lingkup Sosial Masyarakat.

Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut tapi bisa membawa dampak, baik positif maupun negatif, dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan. Masyarakat secara tidak langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak, terlibat dalam pendidikan. Sebab, apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal.

Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaliknya akan membantu

inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan (Noor, 2008).

C. Innovative Governance

1. Definisi *Innovative Governance*

Bartos (dalam Sangkala, 2014:17) mendefinisikan inovasi yang tepat bagi sektor publik yaitu :

“ suatu perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau kuantitas atau kualitas output oleh suatu organisasi”.

Dua pengertian terakhir (dari Schumpeter dan Albury) mengindikasikan serta menjelaskan bahwa sektor publik, baik dalam berbagai literatur, maupun pada tataran praktis ternyata jarang tersentuh dengan inovasi beserta segala atributnya. Sektor publik ternyata sangat miskin dengan khasanah dan literatur inovasi. Sebaliknya, sektor bisnis ternyata sangat kaya dengan budaya dan praktek inovasi.

Terlepas dari perbedaan inovasi di sektor publik dengan sektor bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi tidak akan lepas dari:

a. Pengetahuan baru

Sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru ini merupakan faktor penting penentu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

b. Cara baru

Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.

c. Objek baru

Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunanya, baik berbentuk fisik (berwujud/*tangible*), maupun yang tidak berwujud (*intangible*).

d. Teknologi baru

Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikator kemajuan dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.

e. Penemuan baru

Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan.

Mulgan dan Albury (2003) di dalam *United Kingdom Cabinet Office* menyebutkan bahwa inovasi di dalam sektor publik ditemukan dalam berbagai situasi yaitu :

- a. Mayoritas Inovasi adalah bersifat inkremental sifatnya, relatif perubahan yang kecil terhadap layanan atau proses yang ada.
- b. Inovasi yang terjadi kurang radikal, layanan baru dikembangkan atau secara fundamental melakukan cara baru dalam mengorganisir atau memberikan layanan.
- c. Inovasi secara sistematis atau transformatif terjadi dari waktu-waktu dan didorong oleh munculnya teknologi baru dimana perubahan dalam berbagai sektor, munculnya struktur kerja yang baru, tipe organisasi dan perubahan di dalam keseluruhan kinerja.

2. Level Innovative Governance

Level *innovative governance* dilihat dari sejauh mana pelaksanaan dari *best practices* menurut *United Nations* (dalam Sangkala, 2014:8) yang terdiri atas :

- a. Dampak (*Impact*), sebuah *best practice* harus menunjukkan sebuah dampak positif dan dapat dilihat (*tangible*) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak beruntung.
- b. Kemitraan (*partnership*), sebuah *best practice* harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan dua pihak.
- c. Keberlanjutan (*sustainability*), sebuah *best practice* harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
 - 1) Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi;
 - 2) Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun;
 - 3) Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab beragam tingkatan dan kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan organisasi masyarakat.
 - 4) Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan keuangan.
- d. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (*leadership dan community empowerment*) yakni :
 - 1) Kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya tindakan dan perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan publik;

- 2) Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
 - 3) Penerimaan dan bertanggung jawab terhadap perbedaan sosial dan budaya.
 - 4) Kemungkinan bagi adanya transfer (*transferability*) pengembangan lebih lanjut dan replikasi.
 - 5) Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
- e. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (*gender equality dan social inclusion*) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi fisik/mental serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang berbeda.
- f. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (*innovation within local content dan transferability*).

3. Jenis Inovasi Dalam Sektor Publik

Halversen dkk (dalam Sangkala, 2014:20) membagi tiga tipe spektrum inovasi dalam sektor publik :

- a. *Incremental innovation to radical innovation* (ditandai oleh tingkat perubahan, perbaikan inkremental terhadap produk, proses layanan yang sudah ada.
- b. *Top Down Innovation to bottom-up innovation* (ditandai oleh mereka yang mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top manajemen atau organisasi atau institusi di dalam hirarkhi, bermakna dari para pekerja di tingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayanan masyarakat, dan pembuat kebijakan di level menengah).
- c. *Needs led innovations and efficiency-led innovation* (ditandai apakah inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau agar produk,

layanan, atau prosedur yang sudah ada lebih efisien). kemudian tipe inovasi di sektor publik menurut Halvorsen (2005:261) adalah sebagai berikut :

- 1) *a new or improved service* (pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki),
- 2) *process innovation* (inovasi proses),
- 3) *administrative innovation* (inovasi administratif),
- 4) *system innovation* (inovasi sistem), adalah sistem baru atau perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau bentuk baru kerjasama dan interaksi
- 5) *conceptual innovation* (inovasi konseptual), adalah perubahan dalam outlook
- 6) *radical change of rationality* (perubahan radikal), yang dimaksud adalah pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari pegawai instansi pemerintah

Dalam kaitannya dengan manajemen sektor publik, inovasi berarti penggunaan metode dan strategi desain kebijakan baru serta *standard operating system* yang baru bagi sektor publik untuk menyelesaikan persoalan publik. Dengan demikian, menurut Adriana Alberti and Guido Bertucci (dalam UN, 2006) inovasi dalam *governance* maupun administrasi publik merupakan suatu jawaban kreatif, efektif dan unik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru atau sebagai jawaban baru atas masalah-masalah lama. Kemudian membagi jenis inovasi kepada beberapa jenis anantara lain yaitu :

- a. Inovasi institutional, yang fokusnya adalah pembaruan lembaga yang telah berdiri atau pendirian institusi baru. Pembaharuan lembaga ini membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan tidak memberikan kontribusi

riil dalam penyelenggaraan publik perlu dilakukan perombakan atau dihilangkan agar tidak membebani anggaran publik.

- b. Inovasi organisasional, termasuk introduksi prosedur pekerjaan atau teknik manajemen baru dalam administrasi publik. Upaya menemukan metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan, terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi individu dan penerapan teknologi baru.
- c. Inovasi proses, fokusnya adalah pengembangan kualitas pemberian pelayanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhan-sentuhan inovasi terutama dalam hal *service delivery*, efisiensi layanan dan kemudahan akses layanan.
- d. Inovasi konseptual, fokusnya adalah bentuk-bentuk baru governance (seperti: pembuatan kebijakan yang interaktif, keterlibatan governance, reformasi penganggaran berbasis masyarakat dan jaringan horizontal).

4. Dimensi Inovasi di Sektor Publik

Sedangkan dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor publik adalah terdiri dari :

- a. inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan (desain) produk-produk jasa dan proses-proses produksi termasuk pembangunan, penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan
- b. inovasi *delivery* termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus.
- c. inovasi administratif dan organisasional termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi *supplier*.

- d. inovasi konseptual dalam pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan, strategi dan rationale baru.
- e. inovasi interaksi system cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi lain.

5. Faktor penghambat Inovasi

Inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak dari kasus inovasi diantaranya justru terkendala oleh berbagai faktor. Biasanya budaya menjadi faktor penghambat terbesar dalam mempenetrasikan sebuah inovasi. Perhatikan gambar berikut



Gambar 1. Hambatan Inovasi (Mulgan & Albury dalam suwarno,2008:54)

Hambatan inovasi diidentifikasi ada delapan jenis. Salah satunya yang dimaksud dengan budaya *risk aversion* adalah budaya yang tidak menyukai resiko. Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki segala resiko, termasuk resiko

kegagalan. Sektor publik, khususnya pegawai cenderung enggan berhubungan dengan resiko, dan memilih untuk melaksanakan pekerjaan secara prosedural-administratif dengan resiko minimal. Selain itu, secara kelembagaan pun, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani resiko yang muncul akibat dari pekerjaannya.

Hambatan lain adalah ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya menjadi *follower*. Ketika figur tersebut hilang, maka yang terjadi adalah stagnasi dan kemacetan kerja. Selain itu, hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek, serta hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak fleksibel. Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif masih sangat sedikit. Sangat disayangkan hanya sedikit apresiasi yang layak atas prestasi pegawai atau unit yang berinovasi.

Seringkali sektor publik dengan mudahnya mengadopsi dan menghadirkan perangkat teknologi yang canggih guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan pekerjaannya. Namun di sisi lain muncul hambatan dari segi budaya dan penataan organisasi. Budaya organisasi ternyata belum siap untuk menerima sistem yang sebenarnya berfungsi memangkas pemborosan atau inefisiensi kerja.

6. Tahapan Inovasi

Proses inovasi bagi organisasi berbeda dengan proses yang terjadi secara individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dalam mengadopsi produk inovasi akan melalui tahapan sebagai berikut (Rogers 2003: 420):

a. *Initiation* atau perintisan

Tahapan perintisan terdiri atas fase agenda setting dan *matching*. Ini merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan pemahaman permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Pada tahapan agenda setting ini dilakukan proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah.

Selanjutnya dilakukan pencarian dalam lingkungan organisasi untuk menentukan tempat di mana inovasi tersebut akan diaplikasikan. Tahapan ini seringkali memakan waktu yang sangat lama. Pada tahapan ini juga biasanya dikenali adanya performance gap atau kesenjangan kinerja.

Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian inovasi dalam organisasi. Fase selanjutnya adalah *matching* atau penyesuaian. Pada tahapan ini permasalahan telah teridentifikasi dan dilakukan penyesuaian atau penyetaraan dengan inovasi yang hendak diadopsi. Tahapan ini memastikan feasibilities atau kelayakan inovasi untuk diaplikasikan di organisasi tersebut.

b. Implementation atau pelaksanaan

Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan untuk mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan organisasi. Tahapan implemenasi ini terdiri atas fase redefinisi, klarifikasi dan rutinisasi. Pada fase redefinisi, seluruh inovasi yang diadopsi mulai kehilangan karakter asingnya. Inovasi sudah melewati proses *re-invention*, sehingga lebih dekat dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi pada fase ini, baik inovasi maupun organisasi meredefinisi masing-masing dan mengalami proses perubahan untuk saling menyesuaikan. Pada umumnya terjadi paling tidak perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan dalam organisasi tersebut.

1) Fase klarifikasi adalah terjadi ketika inovasi sudah digunakan secara meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen organisasi dalam

keseharian kerjanya. Fase klarifikasi ini membutuhkan waktu lama, karena mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan, sehingga tidak sedikit yang kemudian justru gagal dalam pelaksanaannya. Proses adopsi yang terlalu cepat justru menjadi kontra produktif akibat resistensi yang berlebihan.

- 2) Fase rutinisasi adalah fase di mana inovasi sudah dianggap sebagai bagian dari organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan sebuah produk baru atau cara baru, karena telah menjadi bagian rutin penyelenggaraan organisasi.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa introduksi *innovative governance* memberikan hasil positif bagi peningkatan kinerja sektor, seperti pertama dapat membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya dan kapasitas bagi peningkatan nilai-nilai publik untuk mendorong kultur yang terbuka dan partisipatif dalam pemerintahan, selanjutnya secara umum dapat mengembangkan tata pemerintahan yang baik. Kedua, bagi peningkatan *image* dan layanan disektor publik, inovasi dapat membantu pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memperbaiki legitimasi dari masyarakat. Ketiga, inovasi di *governance* dapat meningkatkan kepercayaan diri pegawai negeri yang bekerja disektor publik sebagai pendorong pengembangan secara kontinyu. Inovasi dapat melahirkan kapasitas inspirasional yang dapat membangun *sense of inspirasi* di antara pegawai pemerintah. Keempat, walaupun inovasi terbatas pada intervensi *governance* atau inisiatif mikro, mereka dapat menghasilkan efek domino, kesuksesan inovasi pada suatu sektor dapat membuka pintu bagi inovasi di tempat lain. Kelima, inovasi dapat menghasilkan kesempatan untuk inovasi berkelanjutan, semua mendorong lingkungan yang menguntungkan bagi perubahan yang positif. Inovasi dapat mendorong terbangunnya blok baru kelembagaan dan perubahan hubungan antara

tingkat pemerintah dan dalam departemen pemerintahan (Albert and Bertucci, dalam UN, 2007).

7. Inovasi dan Kebijakan

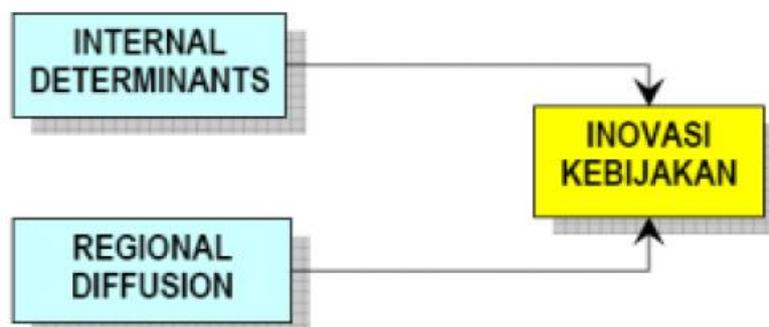
Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah yang saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya yang menggantikan cara yang lama. Demikian pula sifat dari kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan yang lama. Ini artinya bahwa setiap kebijakan, secara isi (konten) pada prinsipnya harus memuat inovasi baru. Kebijakan yang tidak memuat sesuatu yang baru atau menggantikan yang lama hanya akan menjadi kebijakan yang tidak fungsional. Dalam pembauran frasa inovasi dengan kebijakan, dikenal tiga jenis interaksi inovasi dengan kebijakan (Suwarno, 2008:187) yaitu :

- a. *Policy innovation: new policy direction and initiatives*(inovasi kebijakan) Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru. Secara khusus inovasi kebijakan menurut Walker (dalam Tyran & Sausgruber, 2003: 4), "*policy innovation is a policy which is new to the states adopting it, no matter how old the program may be or how many other states may have adopted it*". Jadi yang dimaksud dengan inovasi kebijakan menurut Walker adalah sebuah kebijakan yang baru bagi negara yang mengadopsinya, tanpa Inovasi di Sektor Publik melihat seberapa usang programnya atau seberapa banyak negara lain yang telah mengadopsi sebelumnya.
- b. *Innovations in the policy-making process* (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan) Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Oleh karena itu

inovasi yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan mekanisme partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan.

- c. *Policy to foster innovation and its diffusion* Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong dan mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor.

Berkenaan dengan itu Berry & Berry (dalam Suwarno 2008:23) menjelaskan bahwa penyebaran inovasi kebijakan terjadi dengan merujuk pada dua determinan penting, yaitu internal determinant, dan regional diffusion. Yang dimaksud dengan internal determinant atau penentu internal adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara menentukan keinovativan sebuah negara. Sedangkan *regional diffusion* atau difusi regional adalah kemungkinan sebuah negara mengadopsi kebijakan tertentu lebih tinggi jika negara-negara tetangganya telah mengadopsi kebijakan tersebut Inovasi Kebijakan dan Pelayanan Publik . Sebuah ilustrasi dari internal determinant yang menyebabkan terjadinya inovasi kebijakan adalah perubahan sosial ekonomi dalam negeri, demonstrasi publik, instabilitas politik yang memaksa terjadi perubahan kebijakan mendasar yang berkenaan dengan kepentingan publik. Regional diffusion terjadi ketika negara tetangga atau negara lain menerapkan kebijakan tertentu yang ditiru oleh kita. Perhatikan gambar berikut:



Gambar 2. Rujukan Penyebaran Inovasi Kebijakan (Suwarno, 2008:63)

Dengan demikian, inovasi kebijakan dapat terjadi karena salah satu dari dua faktor tersebut, atau mungkin juga terjadi karena dua faktor tersebut. Namun demikian pada banyak kasus, inovasi kebijakan didorong oleh kedua faktor internal dan eksternal tersebut diatas.

Adapun Steelman (2010:179-182) mengemukakan pendapat mengenai inovasi dan kebijakan di dalam pengimplementasiannya harus memenuhi beberapa faktor antara lain yaitu :

a. Individual

- 1) Motivasi adalah dorongan dari individu-individu yang merasa kurang puas dengan merancang solusi alternatif.
- 2) Norma dan keharmonisan adalah kerja para aktor untuk predisposisi terhadap perubahan untuk melestarikan norma-norma sosial dan keharmonisan.
- 3) Kesesuaian antara nilai dominan dalam sebuah pemerintahan dengan yang lebih rendah akan mempengaruhi dukungan individu untuk inovasi yang diberikan.

b. Struktur

- 1) Aturan dan komunikasi adalah sebuah aturan atau kebijakan yang kemudian di sosialisasikan untuk menerima dukungan kepatuhan
- 2) Insentif adalah pemerintah memeberikan bantuan sumber daya untuk mendukung inovasi yang dilakukan.
- 3) Pembukaan adalah struktur politik yaang terbangun memungkinkan masyarakat minoritas memiliki kesempatan untuk mendorong perubahan.
- 4) Penolakan adalah terjadi inersia dalam lembaga yang ada menciptakan resistensi untuk praktek baru. Upaya yang dilakukan mungkin terhalang oleh dinamika kekuasaan dan kepentingan yang lebih besar.

c. Budaya

- 1) Kejutan adalah pemberian hal yang baru untuk mendapatkan kesempatan alternatif tindakan.
- 2) Pengelompokan adalah mengkondisikan persepsi masyarakat bahwa mereka dirugikan dan harus bertindak secara kolektif untuk memperbaiki situasi.
- 3) Pengakuan dari masyarakat akan sebuah inovasi

8. Penelitian terdahulu

Literatur tentang inovasi di sektor publik sampai saat ini belum banyak tersedia sehingga lebih banyak bergantung pada literatur yang mengkaji inovasi di sektor swasta/bisnis. Meskipun ada kesulitan dalam mentranfer temuan empiris dari sektor swasta ke dalam sektor publik namun penelitian dibutuhkan untuk mendukung teori inovasi khususnya pada sektor publik. Hal ini sejalan dengan ungkapan Hartley (2005:33) *“Research is needed to illuminate and explain the processes which support or which undermine innovation in publicservice organization, viewing innovation as a journey rather than a linear procces”*.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memahami inovasi dari perspektif administrasi publik, diperlukan suatu jembatan pemahaman yakni dengan menelusuri dan mempelajari hasil penelitian terdahulu maupun kajian literatur tentang inovasi di pemerintahan daerah yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, Penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1

Perbedaan Penelitian-Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
David Doloreux (2004)	Regional Innovation System in Canada: A Comparative Study.	Kuantitatif Rumus Chi-Kuadrat	Menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jelas inovasi pada dua daerah yang diteliti. Tingginya inovasi di masing-masing daerah sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar.
Tim Peneliti Balitbang Prov. Jawa Tengah (2007)	Penelitian Program Inovatif Daerah dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah di Kabupaten/ Kota di Jawa tengah	Kualitatif, desain penelitian eksploratif dengan teknik pengumpulan data: observasi langsung, wawancara dan dokumentasi	Menunjukkan bahwa program inovasi yang paling banyak dikreasi dan dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota terkait dengan aplikasi teknologi yakni pembangunan teknologi informasi seperti E-Gov, website, dan LAN.
Rina Mei M (2012)	Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya Bungurasih, Surabaya.	Metode Penelitian Kualitatif, sedangkan tipe penelitian dengan menggunakan tipe deskriptif kualitatif, teknik snowball sampling	Penerapan Smart Card di UPTD Terminal Purabaya dan kualitas pelayanan di terminal Purabaya telah mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan inovasi di UPTD terminal Purabaya meliputi kepemimpinan dengan visi yang jelas.
Muhammad	Inovasi	Kombinasi	Menunjukkan bahwa

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Nur (2014)	Pelayanan Publik Bidang Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang	pendekatan kualitatif dengan kuantitatif berupa Mixed Methods Approaches .	bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik bidang perizinan yang dilaksanakan di BP2TPM Kabupaten Pinrang meliputi inovasi kebijakan, inovasi proses pelayanan, inovasi metode dalam penyampaian layanan, inovasi teknologi, dan inovasi sistem interaksi. Inovasi yang diterapkan di Kabupaten Pinrang adalah inovasi imitasi/ adoptif yang diperoleh melalui proses <i>benchmarking innovation</i> di berbagai daerah lain yang dinilai sukses berinovasi.

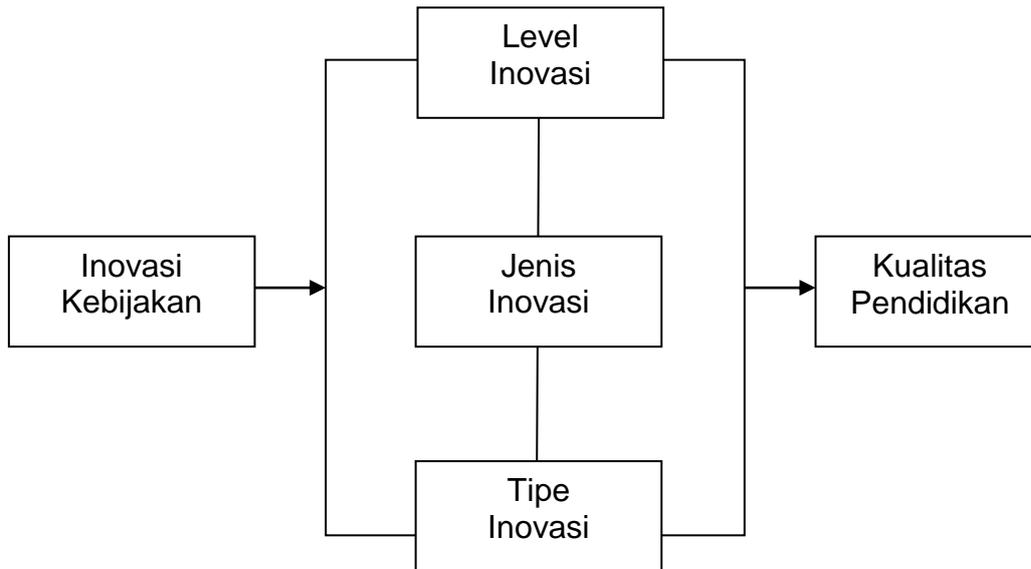
Sumber:

1. David Doloreux 2004. *Regional Innovation System in Canada: A Comparative Study, Regional Studies*, Jurnal Volume 38,5 pp 481-494.
2. Tim Peneliti Balitbang Prov. Jawa Tengah. 2007. *Penelitian Program Inovatif Daerah dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*.
3. Rina Mei M. 2012. Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya Bungurasih, Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. Nomor 1 Januari 2013.
4. Muhammad Nur. 2014. *Inovasi Pelayanan Publik dan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang*. Disertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang disampaikan di atas, aspek yang baru dari penelitian ini adalah dari segi fokus penelitian dan metode serta indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan inovasi organisasi sistem kelas tuntas berkelanjutan. Penelitian tentang inovasi khususnya di bidang pendidikan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data yakni; observasi, wawancara mendalam, kuesioner dan dokumentasi sehingga peneliti berada dalam posisi melihat dari luar maupun dari dalam terhadap pelaksanaan inovasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Dengan menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data tersebut peneliti mampu mengungkapkan makna yang tidak nampak dan menjelaskan makna sesungguhnya dibalik fenomena yang ada. Hal inilah yang menjadi unsur kebaruan dari penelitian ini.

9. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melihat gambaran akan level inovasi, jenis inovasi dan tipe inovasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Untuk melihat level inovasi penulis menggunakan teori dari UN mengenai *best practise*. Sedangkan untuk melihat jenis dan tipe inovasi penulis menggunakan teori dari Halvorsen dkk. Maka dari itu penulis merumuskan kerangka konsep sebagai dasar dalam penelitian ini. Sehingga dapatlah disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian

Level inovasi kebijakan menurut UN dibagi menjadi 6 poin yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender dan pengecualian sosial serta inovasi dalam kontes lokal dan dapat ditransfer. Adapun pembagian jenis inovasi yaitu *incremental innovation to radical innovation*, *top down innovation to bottom-up innovation*, *needs led innovations and efficiency-led innovation*. Sedangkan untuk tipe inovasi yaitu pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki, inovasi proses, inovasi administratif, inovasi sistem, inovasi konseptual, dan perubahan radikal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artinya bahwa penelitian ini menggunakan wawancara, dokumen pribadi, catatan laporan, observasi langsung ke lapangan dan analisis dari bahan – bahan tertulis sebagai sumber data utama. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (McMillan & Schumacher, 2003). Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2003). Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu penghitungan.

Sementara itu, menurut (Sugiono, 2009:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah inovasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Gowa yaitu Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB). Adapun fokus penelitian diarahkan pada :

1. Analisis level inovasi dari kebijakan pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa menurut UN dibagi menjadi 6 poin yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender dan pengecualian sosial serta inovasi dalam kontes lokal dan dapat ditransfer.
2. Analisis jenis inovasi dari kebijakan pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa menurut teori Halvorsen dkk. yaitu *incremental innovation to radical innovation, top down innovation to bottom-up innovation, needs led innovations and efficiency-led innovation.*
3. Analisis tipe inovasi dari kebijakan pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa menurut teori Halvorsen dkk. yaitu pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki, inovasi proses, inovasi administratif, inovasi sistem, inovasi konseptual, dan perubahan radikal

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yakni data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya yakni dari responden penelitian melalui wawancara secara langsung dengan informan, serta data dari hasil pengamatan. Responden penelitian ini terdiri dari 2 kelompok; *Pertama*, kelompok ahli (*ekspert*), dan *kedua*, masyarakat umum yang pernah mendapat manfaat dari program inovasi. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda, Kepala SKPD terkait, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Siswa, Tim Teknis instansi terkait.
2. Data Sekunder, yakni data yang telah didokumentasikan, diperoleh dari instansi terkait serta hasil studi dokumentasi terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian ini seperti: Peraturan pemerintah, Peraturan daerah, dan Peraturan lainnya, data sekolah, jurnal, surat kabar dan dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Young dan Schmidt (1973) dalam Harbani Pasolong (2005:94), observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan pada unit-unit kegiatan yang lebih luas atau lebih besar pada fenomena-fenomena khusus yang diamati. Dalam pengamatan ini, peneliti mengamati, merekam atau mencatat fenomena atau aktifitas yang sehubungan dengan penerapan inovasi dalam kebijakan publik terkhusus program sistem kelas tuntas berkelanjutan.

2. Wawancara

Sugiyono (2012:157), mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:157), mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Dalam metode penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dianggap penting (stakeholder) dari Pemerintah Kabupaten Gowa yakni Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kab. Gowa. Informan lainnya, meliputi: Aparat pemerintah, Pers, Tokoh Masyarakat/LSM, Akademisi, Kepala SLTA, Tokoh organisasi profesi, perwakilan masyarakat pengguna. Dalam melakukan wawancara digunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan bersifat terbuka (*open ended*).

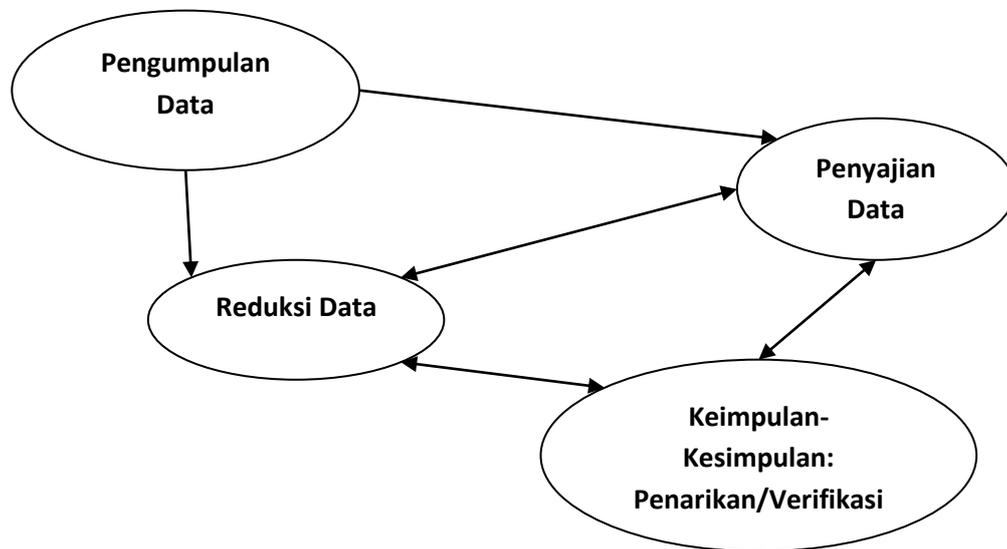
3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yakni dilakukan dengan cara mengumpulkan kemudian menelaah berbagai referensi yang terkait, data-data yang terdokumentasi di kantor

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kab. Gowa, data statistik dan dokumen-dokumen seperti foto-foto mengenai aktivitas di kantor Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa.

F. Teknik Analisis data

Prosedur analisis data yang digunakan mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman (2009: 15-21) yang meliputi beberapa tahapan kegiatan analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teknik analisa dat model interaktif sebagaimana ditampilkan pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 4. Prosedur Analisis Data Kualitatif

Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh mengailalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-penyajian tersebut.

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final”

mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”.

G. Pengecekan Validitas Temuan

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini maka ditempuh beberapa langkah dengan mengacu kepada arahan Cresswell, (2010 : 286-289) sebagai berikut yang meliputi aktivitas : (1) Mentranskripsikan sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut kemudian digunakan untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. (2) *Member Checking*, yakni melakukan (3) Memperbanyak deskripsi dan eksplanasi tentang hasil penelitian, menyajikan deskripsi yang detail mengenai setting atau menyajikan banyak perspektif mengenai tema untuk menambah realitas hasil penelitian. (4) Melakukan *Peer debriefing*, yakni peneliti meminta bantuan para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa dan informan lainnya untuk memperoleh komentar terhadap temuan penelitian.

BAB IV

LOKASI PENELITIAN

IV.1 Kondisi Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa termasuk salah satu daerah otonom yang cukup matang dan memiliki pengalaman dalam beberapa fase pemerintahan karena telah berdiri secara administratif sejak tahun 1957. Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah otonom yang pernah menjadi daerah percontohan dalam penerapan otonomi daerah di era UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Kabupaten Gowa terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 Km², atau setara dengan 3,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Keadaan geografisnya digolongkan ke dalam Daerah Berdimensi Dua, yaitu terdiri dari Dataran Tinggi seluas 80,17% yang meliputi Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Kecamatan Biringbulu dan dataran rendah seluas 19,83% yang terdiri dari Sembilan kecamatan yaitu, Kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu dan Kecamatan Pattallassang

Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa pada tahun 2009 terdiri dari 18 Kecamatan, 122 Desa dan 45 Kelurahan. Kabupaten yang berada pada bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

IV.2 Profil Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa

1. Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa
2. Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa
3. Telepon : (0411) 867774, (0411) 865195
4. Kepemilikan Tanah: Milik Pemerintah
5. Status Bangunan : Hak Pakai

IV.3 Visi dan Misi

VISI

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Dan Berakhlak Mulia”

MISI

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal dan non formal
2. Menyiapkan semua kebutuhan dan fasilitas proses belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan standar minimal.
3. Meningkatkan mutu pendidikan melalui refleksi model pembelajaran efektif (MPE) dan manajemen sekolah efektif (MPE) sekolah unggulan ke sekolah lainnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah yang diintegrasikan dalam revolusi pembelajaran “Punggawa Demba An Education Program”
4. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
5. Menuntaskan anggota masyarakat dari buta aksara .
6. Mengembangkan sekolah kejuruan sesuai keunggulan lokal ,dan pelatihan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
7. Mengembangkan sistim pendidikan anak usia dini.
8. Meningkatkan pembinaan lembaga kepemudaan
9. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pengembangan olah raga unggulan.

IV.4 Keadaan Ketenagaan

Jumlah Personalia pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa sebanyak 82 orang, yang terdiri dari:

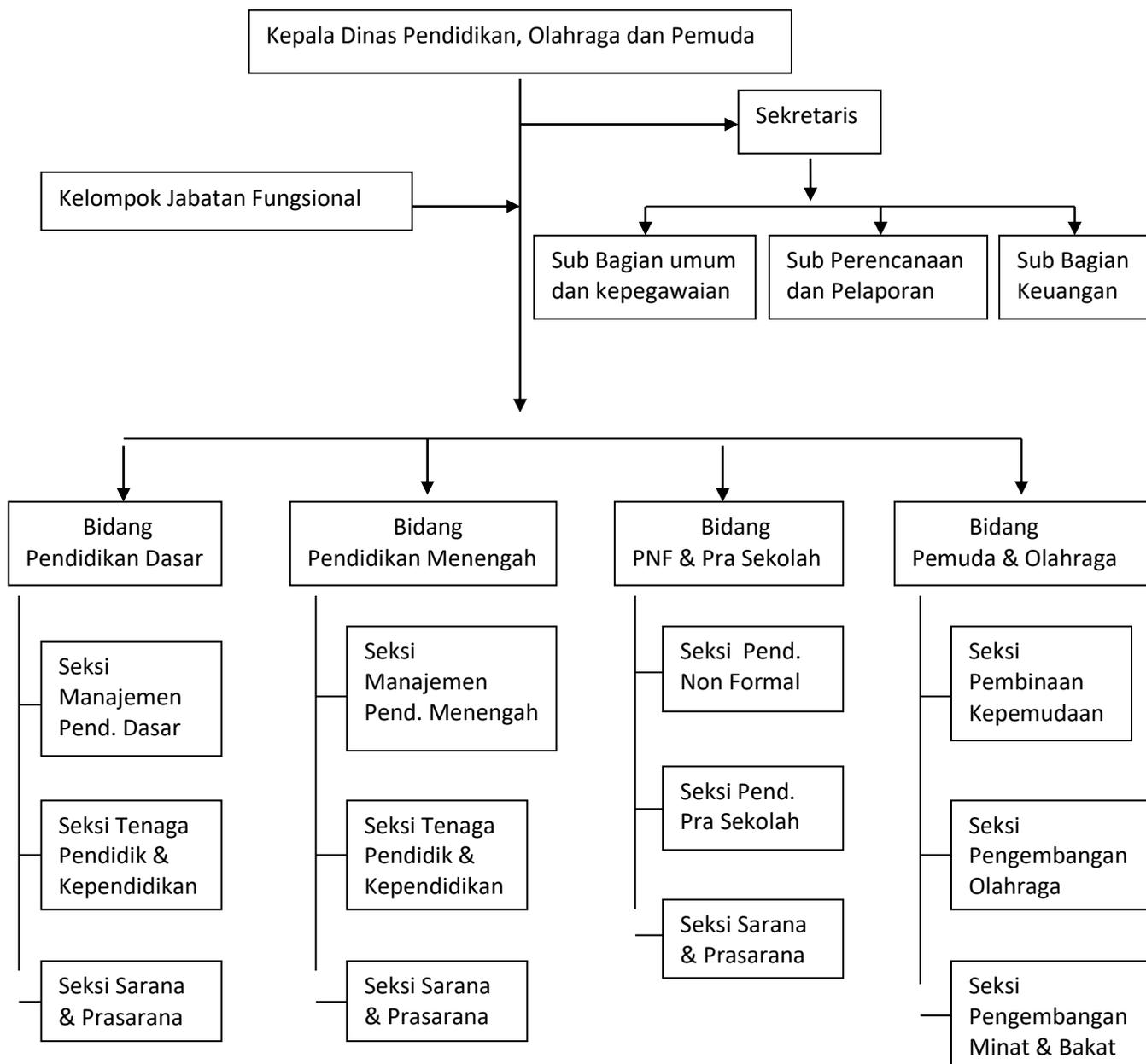
Tabel IV.1
 Persentase Jumlah Personalia Menurut Jenis Kelamin Pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa

Jabatan	Jumlah Personalia Berdasarkan Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda	1 orang	
Sekretaris	1 orang	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	
Staf	4 orang	3 orang
Kepala Sub Perencanaan dan Pelaporan		1 orang
Staf	1 orang	3 orang
Kepala Sub Bagian Keuangan		1 orang
Staf	5 orang	1 orang
Kepala Bidang Pendidikan Dasar	1 orang	
Staf	11 orang	3 orang
Kepala Bidang Pendidikan Menengah	1 orang	
Staf	6 orang	3 orang
Kepala Bidang PNF & Pra Sekolah	1 orang	
Staf	5 orang	3 orang
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	1 orang	
Staf	9 orang	4 orang
Staf Dikorda Kabupaten Gowa	4 orang	8 orang

Sumber : Data Sekunder Dinas Pendidikan, Olahraga, dan Pemuda Kabupaten Gowa.

IV.5 Kedudukan Dalam Struktur Organisasi

Gambar IV.1.
 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa



1. Kepala Dinas Pendidikan

a. Tugas

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Fungsi

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dinas ;
2. Penyusunan Rencana Strategi Dinas ;
3. Penyelenggaraan Pelayanan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda ;
4. Pembuatan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Rincian tugas sebagai berikut:

- Merumuskan rencana strategik dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi dan misi daerah ;
- Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya.
- Menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas ;
- Membina dan mengembangkan karier pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan pemerintahan daerah ;
- Mengarahkan dan merumuskan program kerja dinas dan menetapkan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi ;

- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier ;
- Membina pelaksanaan program waskat di lingkungan dinas ;
- Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan ;
- Membina pelaksanaan tugas – tugas unit pelaksana teknis, pengawas dan penilik luar sekolah ;
- Mengevaluasi dan memonitor hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan dinas ;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Sub Bagian Keuangan

2.1 Sekretaris

a. Tugas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

b. Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangandan perencanaan pelaporan ;
2. Penyelenggaraan kebijakan administarasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perencaan pelaporan ;

3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian ;
4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian.

Dengan Rincian tugas sebagai berikut:

- Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di Bidang Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan ;
- Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda ;
- dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian ;
- Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan ;
- Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan ;
- Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan ;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup dinas ;
- prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier ;
- Menginventarisir permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.II Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktur dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Dengan Rincian tugas sebagai berikut:

- Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah dinas serta penggunaan dan pemeliharaan kantor.
- Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas serta pengaturan pelaksanaan penggunaan dan pemakaian peralatan dan perlengkapan kantor.
- Menyusun rencana perjalanan dinas, pemeliharaan gedung dan pemeliharaan peralatan.

- Melaksanakan tugas keprotokoleraan dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian lainnya ;
- Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data yang akan mengikuti pelatihan kepegawaian dan data kepegawaian lainnya.
- Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas ;
- Mempersipkan rekomendasi pemberian izin belajar, tugas belajar, ujian dinas serta pemberian tanda penghargaan barang dan jasa, mepersiapkan bahan penerbitan kartu pegawai, kartu istri / kartu suami, kartu taspen dan askes.
- Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai.
- Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai ;
- Mengavaluasi hasil program kerja tahunan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.III Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

a. Tugas

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Pembinaan, Pengkoordinasikan, Pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4. Pelaksanaan Evaluasi Program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Dengan Rincian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk operasional kegiatan staf
- Menghimpun data dalam rangka program kerja dinas
- Menyiapkan, menghimpun hasil program kerja dari setiap bidang bahan pelaporan
- Menyusun rencana tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Mengendalikan rencana tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Mengevaluasi program tahunan
- Memfasilitasi penyusunan laporan/kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas.
- Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dinas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.IV Sub Bagian Keuangan

a. Tugas

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi

tugas, membimbing, memeriksa / mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Keuangan ;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Keuangan ;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Keuangan.

Dengan Rincian tugas sebagai berikut:

- Membuat rencana kerja dan operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan;
- Membuat daftar usulan kegiatan ;
- Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian ;
- Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas ;
- Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum
- Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Lembaga Teknis Daerah) yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan Keputusan Bupati.
- Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi.

- Mendistribusikan uang kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran ;
- Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan ;
- Mengevaluasi hasil program kerja dan membuat laporan hasil kegiatan ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :

- a. Seksi Manajemen Pendidikan
- b. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- c. Seksi sarana dan prasarana

3.1 Kepala Bidang Pendidikan Dasar

a. Tugas

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Pendidikan Dasar meliputi manajemen pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.

b. Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pendidikan Dasar;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi pada Bidang Pendidikan Dasar.

Dengan Rincian tugas sebagai berikut:

- Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- Mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam melaksanakan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- Menilai prestasi kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pendidikan Dasar sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- Menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan Dasar sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan dasar termasuk pengawas;
- Memberikan layanan teknis di Bidang Perencanaan dan memonitor pelaksanaan pada TK, SD, SMP dan mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi pendidikan;
- Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan ;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.II Seksi Manajemen Pendidikan

a. Tugas

Seksi Manajemen Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Manajemen Pendidikan.

b. Fungsi

1. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Manajemen Pendidikan ;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Manajemen Pendidikan ;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural alam lingkup Seksi Manajemen Pendidikan ;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.

Dengan Rincian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Manajemen Pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- Memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan sekolah dasar;
- Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dasar;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dasar;
- Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan manajemen sekolah;
- Melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten, pengkoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan kerangka dasar serta struktur kurikulum pendidikan dasar;
- Melaksanakan pendidikan dasar dan pengembangan potensi murid pendidikan dasar dalam melakukan pembinaan wajib belajar pendidikan dasar;
- Mengusul bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar, dan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dasar;
- Melakukan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan seksi dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.III Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

a. Tugas

Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

b. Fungsi

1. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Dengan Rincian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas ;
- Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- Melaksanakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar ;
- Mengangkat dan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan dasar dan pemberian layanan teknis tentang pendidikan dasar ;

- Memberi bimbingan teknis serta menelaah laporan pengawas pendidikan dasar ;
- Melaksanakan inovasi pendidikan dasar dan pengembangan standar kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ;
- Mengoreksi usul mutasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar ;
- Mengupayakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar ;
- Membuat laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.IV Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

a. Tugas

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek dan membuat laporan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

b. Fungsi

1. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar ;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar ;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawas program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar ;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

Dengan Rincian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas ;
- Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier ;
- Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional, sarana dan prasarana pendidik dasar sesuai dengan bidang tugasnya
- Melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar ;
- Melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar serta melakukan pemantauan perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana ;
- Mengecek penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar ;
- Mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan sarana dan prasarana Bidang Pendidikan Dasar serta melakukan pemantauan koordinasi dengan unit satuan organisasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Bidang Pendidikan.
- Menyusun laporan serta sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan, maka penulis merumuskan kesimpulan bahwa :

1. Jenis-jenis inovasi sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) Kabupaten Gowa meliputi ; Inovasi Kebijakan, Inovasi Penilaian pendidikan, Inovasi Pembelajaran Remedial Berkelanjutan, Inovasi kerja sama Universitas di Indonesia. Dari sejumlah bentuk inovasi tersebut sejalan dengan tipe atau jenis inovasi menurut Halversen (2003) dilihat dari derajat keaslian dan kebaruan pada dasarnya inovasi tersebut adalah *Incremental innovation to radical innovation* (Inovasi yang mengarah pada perubahan, perbaikan inkremental terhadap produk, proses layanan yang sudah ada) . selain itu dia juga tergolong inovasi imitasi/adoptif yang diperoleh melalui *benchmarking innovation* di berbagai negara.
2. Level inovasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) berdasarkan rumusan *United Nations* dari keseluruhan dimensi berada pada level tinggi dengan nilai rata-rata 71% ini bermakna dari keseluruhan dimensi yang meliputi : dimensi dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat, konteks lokal dan kesetaraan warga secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, terdapat dimensi yang perlu untuk diperbaiki atau ditingkatkan yakni pada aspek transfer program.
3. Penerapan SKTB di Kabupaten Gowa di dukung oleh faktor-faktor yakni : Adanya Hukum atau Regulasi, dukungan Pemerintah Daerah, Adanya Tujuan Yang Jelas, Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Ketersediaan dana yang

cukup besar, Ketersediaan Beasiswa bagi Putra dan Putri Daerah. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat meliputi : Lemahnya Skill tim teknis SKTB di bidang ICT, Lemahnya Mindset Guru terhadap kinerja sebagai seorang pendidik, Adanya Multi Implementasi Kurikulum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, berikut ini peneliti menyampaikan beberapa saran yang tertuang dalam tesis ini untuk dapat di jadikan sebagai acuan :

- a. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati hendaknya membuat Peraturan Bupati (PERBUB) yang menjadi landasan hukum penerapan SKTB sehingga penyelenggaraan yang sedang berlangsung memiliki jaminan keberlanjutan dimasa yang akan datang.
- b. Hendaknya Visi dan Misi SKTB di pertegas sehingga arah dan tujuannya lebih jelas, sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai.
- c. Meningkatkan kapasitas keahlian pegawai di Dinas Pendidikan di Kabupaten Gowa melalui pendidikan dan pelatihan berdasarkan job kerja yang telah diamanahkan khususnya di bidang ICT.
- d. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menilai penerapan inovasi SKTB karna masyarakat penggunalah yang akan memperoleh manfaat dari penerapan inovasi tersebut
- e. Transfer program perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisai lewat pangkalan data webside, sebagai solusi dari permasalahan pendidikan nasional di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albury, David. 2003. *Innovation in the Public Sector*. Discussion paper. The Mall. London.
- Australian National Audit Office, 2009. *Innovation in the public Sector Enabling Better Performance, Driving New Directions. Better Practice Guide*. Commonwealth of Australia.
- Bingham, Richard D., & David Hedge, 1986, *State and Local Government In A Changing Society* (Second edition), New York, Mc Graw-Hill, Inc.
- Buku Panduan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, 2013 Dinas Pendidikan Olahraga Dan Pemuda Kabupaten Gowa
- Creswell, John W dan Vicki L.Plano Clark, 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. California Saga Publication. Inc
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Cuban, L. (1991). *Curriculum Stability and Change*. Dalam *Handbook of Research on Curriculum*. New York : Macmillan Publishing Co.
- Damanpour, Fariborz, (1991), "Organizational Inovasi : A Meta Analysis of Efect of Determinants and Moderators", *Academy of Management of Journal*
- Doloreux, David. 2004. *Regional Innovation System in Canada: A Comparative Study, Regional Studies*, Jurnal Volume 38,5 pp 481-494.
- Eggers WilliamD and Kumar S, Shalabah, 2009. *The Public Innovator's Playbook: Nurturing Bold Ideas in Government*. Deloitte Research.
- Fadel, Muhammad. 2008. *Reiventing Local Goverment, Pengalaman dari Daerah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Frederickson, George H. And Smith, B.Kevin. 2012. *The Public Administration Theory Primer*. USA : Westview Press
- Guba, Egon G. Et.all 1981. *Efective Evaluation*. San Franssisco: Jossey Base Publishers.
- Halvorsen, Thomas., Johan Hauknes, Ian Miles, and Rannveig Roste 2005. *On the Differences between Public and Private Sector Innovations*. Publin Report.D9.NIFU STEP, Oslo.
- M, Mei Rina. 2012. *Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya Bungurasih, Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. Nomor 1 Januari 2013.
- McMillan, James H., & Sally Schumacher. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 5 th ed., Boston: Allyn

- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. (2007). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Mulgan, G. & Albury, D, 2003. Innovation in the Public Sector. Working Paper Version 1.9, October, Strategy Unit, UK Cabinet Office
- Nur, Muhammad. 2014. Inovasi Pelayanan Publik dan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang. Disertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Patton, Michael Quinn. 1987. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills Saga Publications.
- Pasolong, Harbani. 2005. Metode Penelitian Administrasi : untuk Organisasi Profit dan Non Profit. Makassar. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Pasal 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Rogers, Everett M. 1983. Diffusion of Innovation (Ed.3). New York: The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co-,Inc.
- Sa'ud, Udin Syaefuddin. 2013. *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sangkala, 2014. *Innovative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Surabaya: Capiya Publishing.
- Skogen, Kjell. 1997. *An Introduction to the Process of Innovation*. Chapter II in DSSI-project.Socrates Programme
- Soemanto, Wasty. 1980. *Petunjuk untuk Pembinaan Pendidikan* Surabaya: Usaha Nasional.
- Steven Cohen & Eimicke William. 1998. *Tools For Innovators: Creative Strategies For Managing Public Sector Organizations* Jossey. San Francisco: Bass Publishers.
- Steelman, Toddi A. "Elite and Participatory Policymaking: Finding Balance in a Case of National Forest Planning." *Policy Studies Journal* Vol. 29 No. 1 (2001). By: EBSCOhost Research Databaseses. (diakses 2 Maret 2015)
- Steelman, Toddi A, 2010. *Implementing Innovation*. Wasingthon DC. Georgetown University Press.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, 2003. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta. Pustaka. Pelajar.*
- Subandijah. 1993. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta
- Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta. STIA-LAN Press
- Tilaar, H. A. R. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Indonesia Tera.
- Tim Peneliti Balitbang Prov. Jawa Tengah. 2007. *Penelitian Program Inovatif Daerah dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*.
- Tyran, Jean-Robert and Rupert Sausgruber., 2003. The Diffusion of Policy Innovation: An Experimental Investigation. Discussion Paper no. 2003-14. Department of Economics, Universität St.Gallen.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dokumen Negara RI.
- Undang-Undang 1945, Pasal 31 ayat (3&5) Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dokumen Negara RI
- United Nation. 2007. Innovations in Government in the Middle East, North Afrika and Western Barkan: Making Government Work Better in the Mediterranean Region. New York United Nation Publication.

